



Dokumen Pengadaan

Jenis Pekerjaan : Pengadaan Jasa pembuatan Film Kegiatan
Proyek Rimba

Metode : Pascakualifikasi

Sumber Pendanaan : MCA Indonesia

**Program MCAI-RIMBA, WWF-Indonesia
2017**



A. DOKUMEN KUALIFIKASI

- A. Nama Pekerjaan** Jasa pembuatan film mengenai kegiatan proyek RIMBA
- B. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan** Jangka waktu penyelesaian pekerjaan:
45 (empat puluh lima) hari kalender.
- C. Syarat kualifikasi konsultan**
1. Memiliki Izin Badan Usaha yang masih berlaku .
 2. Pernyataan Bersedia / Memenuhi semua syarat yang diminta dengan menandatangani PAKTA INTEGRITAS (terlampir)
 3. Memiliki NPWP.
 4. Melampirkan dokumen pendukung :
 - Legalitas usaha , (Akte Notaris, NPWP)
 - Penawaran Anggaran Biaya
 - Memberikan daftar pengalaman perusahaan dan tenaga ahli yang terlibat (CV)
 - Mengisi dokumen sesuai yang ada di lampiran
- D. Sumber Dana** Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan Grant MCA Indonesia.
- E. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran**
1. Bentuk mata uang penawaran : Rupiah
 2. Pembayaran dilakukan dengan cara Transfer (Termin)
- F. Masa Berlaku Penawaran** Masa berlaku penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.
- G. Penyampaian**
1. Proposal penawaran di kirim via email ke :



Penawaran

Procurement_rimba@wwf.id cc edoringin@wwf.id

**H. Batas waktu
Penyampaian
proposal**

Batas waktu penerimaan pada:

**Hari : Minggu
Tanggal : 3 Desember 2017
Jam : 14.00 wib**

**I. Pengumuman
Hasil**

Pengumuman perusahaan yang terpilih untuk pekerjaan ini nantinya akan diumumkan melalui website WWF pada menu publikasi, info pengadaan yaitu di http://www.wwf.or.id/berita_fakta/pengadaan/

B. KERANGKA ACUAN KERJA

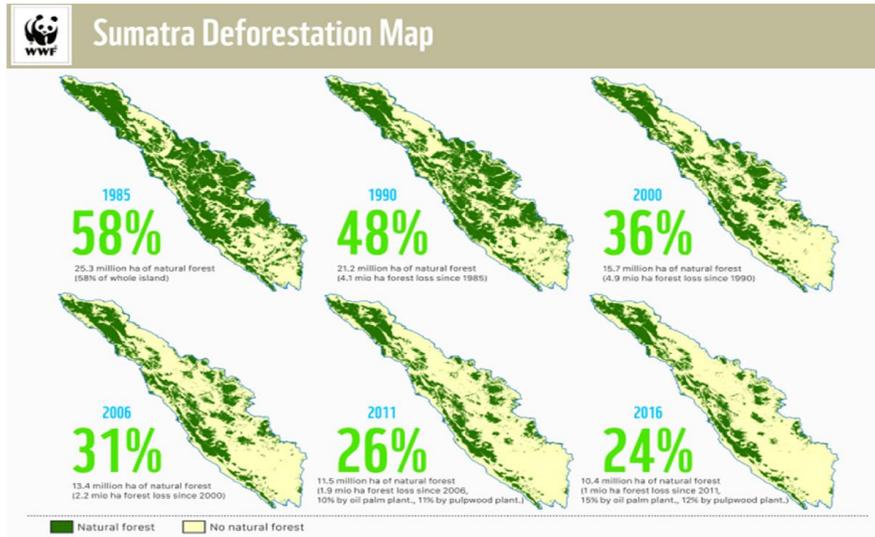
Latar Belakang

Deforestasi Hutan Sumatera

Dalam seperempat abad, Sumatera telah kehilangan sebanyak 50% hutan alamnya yang disebabkan oleh adanya perubahan fungsi dari hutan alam menjadi hutan tanaman industri dan perluasan perkebunan untuk kayu dan kebutuhan pangan khususnya kelapa sawit.

Laju kehilangan hutan terbesar terjadi pada hutan dataran rendah seperti pada bagian timur Bukit Barisan. Laju kehilangan hutan tercepat di Indonesia terjadi di Provinsi Riau, dalam kurun 25 tahun, Riau telah kehilangan hutan tropis dan gambut seluas 4,2 juta hektar (65%).

WWF-Indonesia telah bekerja sejak tahun 1995 tahun di Sumatera untuk mengurangi laju kerusakan hutan, menyelamatkan keanekaragaman hayati termasuk manusia yang hidup di dalamnya. Sekian lama sudah melakukan kegiatan di Sumatera, maka sudah waktunya untuk menyuarakan keberhasilan yang sudah dilakukan oleh WWF-Indonesia. Untuk itu diperlukan visual yang kuat untuk diperlihatkan kepada public di Indonesia tentang keberhasilan-keberhasilan yang sudah WWF-Indonesia capai.



Gambar 1. Peta degradasi hutan di Pulau Sumatera dari Tahun 1986-2016

Gambar 1 menunjukkan tutupan hutan Sumatera yang dihasilkan dari analisis citra satelit Landsat TM, Landsat ETM, dan Landsat 8 oleh WWF-Indonesia. Analisis dilakukan hanya pada *main* island Sumatera atau pulau utama Sumatera, tidak termasuk kepulauan (Bangka Belitung, Kep. Riau) dan pulau-pulau kecil. Hasil analisis menunjukkan bahwa sejak tahun 1985 (luas tutupan alam +/- 25.3 Juta ha) hingga 2016 (luas tutupan hutan alam tersisa +/- 10.4 Juta ha) telah terjadi deforestasi sebesar +/- 14.9 Juta ha, dengan laju deforestasi sebesar 2.9% per tahun

Program Koridor RIMBA :

Untuk menjawab laju deforestasi Pulau Sumatera, WWF-Indonesia atas dukungan dari MCA-Indonesia membentuk suatu program untuk membentuk suatu koridor, dengan nama Program RIMBA.

A. Tentang Program Koridor RIMBA



Program Koridor RIMBA adalah program kerjasama para pihak yang bertujuan untuk pelestarian hutan dan peningkatan penghidupan masyarakat yang didukung oleh Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-INDONESIA).

Lanskap Koridor RIMBA seluas 3,8 juta hektar meliputi Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat serta 19 Kabupaten di dalamnya merupakan salah satu koridor ekosistem yang sudah ditetapkan dalam Perpres 13 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Pulau Sumatera.

Keberhasilan program ini bergantung pada partisipasi aktif para pihak baik pemerintah pusat dan daerah, serta peran aktif masyarakat, swasta dan CSOs. Program ini akan fokus pada 8 kabupaten yaitu; Kabupaten Kuantan Singingi, Dharmasraya, Tebo, Kampar, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Kerinci dan Merangin.

Program MCA-INDONESIA – RIMBA akan berjalan selama 2 tahun, dimulai dari Januari 2016 dan berakhir pada bulan Maret 2018.

Program ini didukung juga oleh Program GEF (Global Environment Facility) RIMBA, yang dikelola oleh UNEP Regional Asia-Pasifik untuk memastikan keberlanjutan program di Koridor RIMBA selama 6 tahun.

B. Pentingnya Koridor RIMBA

Dalam seperempat abad, Sumatera telah kehilangan sebanyak 50% hutan alamnya yang disebabkan oleh adanya perubahan fungsi dari hutan alam menjadi hutan tanaman industri dan perluasan perkebunan untuk kayu dan kebutuhan pangan khususnya kelapa sawit.

Laju kehilangan hutan terbesar terjadi pada hutan dataran rendah seperti pada bagian timur Bukit Barisan. Laju kehilangan hutan tercepat di Indonesia terjadi di Provinsi Riau, dalam kurun 25 tahun, Riau telah kehilangan hutan tropis dan gambut seluas 4,2 juta hektar (65%).

Pemerintah sepakat bahwa terjadinya kerusakan lingkungan yang menyebabkan hilangnya hutan berdampak pada kesehatan dan penghidupan termasuk juga polusi.



Tantangan adanya kompleksitas yuridiksi termasuk mengkoordinasikan tidak hanya untuk pemerintah provinsi, namun juga kabupaten dan kementerian terkait menjadi penting untuk menunjukkan adanya perubahan. Adanya Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Keputusan Presiden No. 13/2012) yang merupakan turunan dari Peta Jalan Sumatera 2020 merupakan langkah koordinasi yang lebih baik.

Koridor RIMBA telah diidentifikasi sebagai Koridor Ekosistem sebagai bagian dari Tata Ruang Pulau Sumatera namun lebih detail kepada integrasi pengelolaan kawasan seluas 3,8 juta hektar di Sumatera Bagian Tengah.

Koridor Ekosistem RIMBA sangat berkontribusi terhadap lingkungan secara global, baik secara nasional, ekonomi lokal, penghidupan dan kemakmuran. Lokasi tersebut adalah:

1. Mencakup tiga dari enam prioritas Lanskap Konservasi Harimau, yang merupakan rumah bagi Agile Gibbon (*Hylobates agilis ungu* dan *H. Agilis agilis*) dan Siamang (*Symphalangus syndactylus*), dua dari empat spesies Owa yang ditemukan di Sumatera, dan populasi kecil Orangutan (*Pongo abelii*) yang diintroduksi ke Taman Nasional Bukit Tigapuluh.
2. Meliputi kawasan yang masih terdapat keanekaragaman hayati tinggi, dataran rendah tanah mineral, hutan gambut, termasuk Taman Nasional Kerinci Seblat dan Berbak.
3. Mencakup tiga daerah penyangga penting yaitu, Indragiri, Kampar dan Sungai Batanghari, - yang melindungi satu juta hektar kawasan di sekitarnya.
4. Hutan Sumatera merupakan penyerap karbon utama, sehingga dengan terjadinya konversi dan kebakaran hutan, menjadikan Indonesia sebagai salah satu sumber emisi gas rumah kaca terbesar versi LULUCF.

Namun demikian, wilayah ini terus menerus mengalami konversi lahan dan perubahan tata guna lahan. Antara tahun 2007 dan 2009, tutupan hutan alam mengalami penurunan dari 2,68 juta hektar menjadi 2,53 juta hektar.

Fragmentasi hutan terus berlanjut, begitu juga dengan kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati, jasa ekosistem dan cadangan karbon.



Indonesia diperkirakan telah melepas emisi CO₂ sebesar 1,2 gigaton pertahunnya akibat berkurangnya hutan alam, dekomposisi gambut dan pembakaran hutan, yang kesemuanya disebabkan konversi lahan di Sumatera.

Program Kemakmuran Hijau MCA-INDONESIA menginvestasikan sekitar \$5 juta dalam program yang diarahkan pada program penyediaan energi rendah karbon di wilayah Koridor RIMBA yang memerlukan pemeliharaan atau restorasi dataran tinggi dan konservasi gambut tropis di dataran rendah.

Alat Komunikasi Untuk Diseminasi Kerja Rimba Koridor

Video ini sangat penting untuk mendukung proses diseminasi program-program RIMBA Koridor kepada target grup tertentu dan juga mengaungkan hasil-hasil kerja Rimba Koridor kepada target grup yang sudah di identifikasi. Adapun pemangku Kepentingan yang terkait program Koridor RIMBA yang dikelompokkan dalam 4 kelompok sebagai berikut:

1. Pemerintah nasional dan daerah:

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian PUPR
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
- Kementerian Pariwisata
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Provinsi Jambi
- Provinsi Sumbar
- Provinsi Riau
- Badan Restorasi Gambut (BRG)
- Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di 3 provinsi Koridor RIMBA



2. Masyarakat setempat yang langsung berinteraksi dengan Koridor RIMBA.
3. LSM terkait Koridor RIMBA:
 - LSM/NGO Grantee MCAI di 3 provinsi (Riau, Jambi, Sumatera Barat).
 - LSM lokal yang bekerja untuk tata kelola lingkungan di 3 provinsi (Riau, Jambi, Sumatera Barat).
4. Perusahaan perkebunan dan konsesi hutan terkait Koridor RIMBA.
5. Publik di Sumatera dan Indonesia (melalui media massa lokal di Sumatera dan media nasional).
6. Donor terkait Koridor RIMBA.

Tujuan

Tujuan untuk pembuatan video ini adalah menyampaikan hasil kerja project RIMBA yang sangat signifikan bagi terjadinya perubahan sosial di masyarakat khususnya di tiap-tiap kluster, dan pentingnya koridor RIMBA ini bagi seluruh Sumatera

Tak-tik

Menampilkan hasil kerja-kerja WWF-Indonesia pada wilayah RIMBA Koridor seperti dilakukan di tingkat tapak seperti Riau, Jambi dan Sumatera Barat, yang dilakukan secara luar biasa dan juga berdampak bagi perubahan social, dan juga kerja-kerja bagi pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Outcome

Image asset dan film yang dapat digunakan sebagai laporan ke donor dan kerja, social media dan untuk konsumsi stake holder dan Donor

Target Audience

1. Pemerintah nasional dan daerah:



- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
 - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Kementerian Dalam Negeri
 - Kementerian PUPR
 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
 - Kementerian Pariwisata
 - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 - Kementerian Pertanian
 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 - Provinsi Jambi
 - Provinsi Sumbar
 - Provinsi Riau
 - Badan Restorasi Gambut (BRG)
 - Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di 3 provinsi Koridor RIMBA
2. Masyarakat setempat yang langsung berinteraksi dengan Koridor RIMBA.
 3. LSM terkait Koridor RIMBA:
 - LSM/NGO Grantee MCAI di 3 provinsi (Riau, Jambi, Sumatera Barat).
 - LSM lokal yang bekerja untuk tata kelola lingkungan di 3 provinsi (Riau, Jambi, Sumatera Barat).
 4. Perusahaan perkebunan dan konsesi hutan terkait Koridor RIMBA.
 5. Publik di Sumatera dan Indonesia (melalui media massa lokal di Sumatera dan media nasional).
 6. Donor terkait Koridor RIMBA.

Deliverables:

Asset Image yang didapat, akan digunakan untuk: Konsumsi Stake holder dan Donor

Film yang dibuat sebagai berikut :



- Video Profile 3-5 menit tentang tata kelola RIMBA (Pokjanas Tata Kelola RIMBA), sekat kanal, restorasi gambut, KPH, sustainable rubber, dll)
- Video Profile 3 menit di Kluster 1
- Video Profile 3 menit di Kluster 2
- Video Profile 3 menit di Kluster 3

Intellectual Property

All images will be embargoed until January 2018; and all assets will be shared with the Network via the HIVE on January, 2018. Please send any requests to use assets before March 2018 to Diah R. Sulistiowati for approval.

Diseminasi

Profile Rimba Project ini akan diputar di masyarakat target dan menjadi bahan jika ada meeting dengan stakeholder target.



C. PEMBAYARAN

Pembayaran akan dilakukan secara bertahap

D. JADWAL KEGIATAN

Masa Pekerjaan ini selama 45 hari kalender di mulai pada saat tanda tangan kontrak.



Lampiran 1

Contoh Format Dokumen (*format dokumen tidak harus persis sama namun tidak mengurangi maksud / tujuan yang ada*).

1. CONTOH BENTUK SURAT PENAWARAN

[KOP BADAN USAHA]

Nomor : _____, _____ 2017
Lampiran :

Kepada Yth.:
Panitia Pengadaan Jasa Pembuatan Video
Di Jambi

Perihal : Penawaran pembuatan video

Sehubungan dengan pengumuman *Pengadaan jasa untuk pembuatan film untuk Masyarakat dan Pemda pada proyek RIMBA* dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp. _____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ____ (_____) hari kalender

Penawaran ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

Rencana dan metodologi Kegiatan;

1. *Jadwal Kegiatan ;*
2. *Rencana Anggaran biaya ;*
3. *Dokumen Isian Kualifikasi;*

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV
Direktur Utama



Contoh Format PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ [nama wakil sah badan usaha]
No. Identitas : _____ [diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor]
Jabatan : _____
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi/ _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka *pengadaan Jasa pembuatan film untuk masyarakat dan pemda pada Project RIMBA* dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau seluruh anggota tim tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
3. Tidak sedang mengerjakan kegiatan yang di danai oleh MCAI (Millenium Challenge Account Indonesia).
4. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ [tempat], __ [tanggal], ... (bulan) 2017

(Materi Rp. 6000)

[Direktur utama]



2. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI (SILAHKAN DI ISI JIKA DATA TIDAK ADA DIKOSONGKAN SAJA)

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah jika badan usaha]*
Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]*
Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih*
untuk _____ *yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]*
dan atas nama
Alamat : _____
Telepon/Fax : _____
Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat _____ *[sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akte pendirian/perubahan/surat kuasa.*
2. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
3. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
4. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
5. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:



A. Data Administrasi

1.	Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi)	:	_____
2.	Status	:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.	Alamat Kantor Pusat	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
4.	Alamat Kantor Cabang	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____

B. Izin Usaha

1.	No. Surat Izin Usaha	:	_____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin usaha	:	_____
3.	Instansi pemberi izin usaha	:	_____

C. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1.	No. Surat Izin _____	:	_____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin	:	_____
3.	Instansi pemberi izin	:	_____



D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi	
a. Nomor Akte	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
2. Akta Perubahan Terakhir	
a. Nomor Akte	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____

E. Pengurus

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha



F. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak : _____
b. Bukti laporan Pajak Tahun : No. _____ tanggal _____ terakhir

G. Data Pengalaman Perusahaan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PT/CV/Firma/Koperasi

*[meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]*

*(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan dalam badan usaha]*